

KKB Bakar Bandara Sugapa di Intan Jaya Dipastikan Hoaks

JAKARTA (IM) - Kapolres Intan Jaya AKBP Sandi Sultan memastikan bahwa isu soal terbakarnya Bandara Sugapa adalah hoaks atau berita bohong.

Sandi menyebut, yang terbakar adalah satu warung rumah makan milik warga dan satu kendaraan Transib yang berisikan air serta satu unit ambulans. Pembakaran itu, kata Sandi, dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Kebakaran tersebut dilakukan oleh KKB dan tempat kejadianannya tidak jauh dari bandara sehingga timbul informasi yang salah bahwa bandara Sugapa Intan Jaya terbakar namun yang ses-

ungguhnya tidak terbakar," kata Sandi kepada wartawan, Jakarta, Selasa (2/11).

Sandi memastikan bahwa situasi Kamtibmas di Kabupaten Intan Jaya sudah berangsur pulih dan aktivitas masyarakat berjalan normal. Tak hanya itu, TNI dan Polri juga memukul mundur KKB.

Kapolda mengimbau kepada kelompok KKB untuk tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya. Pasalnya, hal itu sangat membuat masyarakat merugi dan menderita.

"Upaya Penegakan hukum yang tegas dan terukur terhadap KKB terus kami lakukan," tandasnya. ● **Ius**

Kemendagri Kaji 1 Maret Jadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara

JAKARTA (IM) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih mengkaji usulan penetapan 1 Maret sebagai hari besar nasional, yakni Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Usulan tersebut diajukan oleh Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X berkaitan dengan sejarah Serangan Umum 1949 di Yogyakarta.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dalam kunjungan kerja ke Kantor Gubernur DIY, Senin (1/11), menururkan, usulan tersebut bukanlah hal baru. Menurut Tito, pada 2018, Pemerintah DIY telah mengajukan usulan tersebut. Kemudian, pada 2019, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menunjuk Kemendagri untuk menindaklanjuti usulan tersebut.

"Beliau (Gubernur DIY) mengusulkan namanya Hari Penegakan Kedaulatan Negara, ini kami juga melakukan kajian," kata Tito, melalui

keterangan tertulisnya, Selasa (2/11). Tito mengatakan, Kemendagri juga menjadi kementerian yang memimpin Panitia Antar-Kementerian (PAK). Pembentukan panitia itu dimaksudkan untuk melakukan kajian dan menggelar untuk membahas usulan untuk selanjutnya disampaikan kepada presiden.

Selain itu, kata Tito, Pemerintah DIY diminta untuk menyiapkan naskah akademik yang kuat, serta melakukan sosialisasi. Tito menyarankan agar naskah akademik juga berpijak pada fakta sejarah, bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan buah dari perjuangan bangsa, bukan merupakan hadiah atau pemberian.

"Termasuk dalam perjuang mempertahankan kemerdekaan tersebut. Ia menambahkan, pada 1 Maret 1949, Yogyakarta telah menjadi saksi dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa," ujarnya. ● **mei**

FOTO: ANT



PELAYARAN SATGAS KJK 2021 BERAKHIR
Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Tingkat III Angkatan ke-68 melakukan parade roll saat akan memasuki Dermaga Madura, Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (2/11). Pelayaran Satgas Kartika Jala Krida 2021 yang membawa Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Tingkat III Angkatan ke-68 selama 99 hari dengan rute wilayah perairan teluar Indonesia telah resmi berakhir.

KPK Usut Aliran Suap untuk Bupati Kuansing Lewat Ajudannya

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut aliran uang dugaan suap terkait pengurusan perpanjangan izin hak Guna Usaha (HGU) sawit, PT Adimulia Agrolestari untuk Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra. Aliran uang dugaan suap tersebut diusut melalui sejumlah saksi, salah satu ajuan Andi Putra, Hendri Kurniadi.

Selain Hendri Kurniadi, penyidik juga mengorek keterangan para saksi lainnya yakni, Andi Meiriki (Staf Bagian Umum Pemkab Kuansing), Mardiansyah (Plt Kepala DPMPITSPK), Mubjelan (Asisten 1 Setda Kuansing), Ruko (Protokoler Setda Kuansing), Ibrahim Dasuki (Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Pemkab Kuansing).

Kemudian, Dwi Handaka (Kabid Survey dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Perumahan Riau), serta tiga orang Sopir, Deli, Yuda, dan Sabri. Mereka diperiksa Kantor Ditreskrimsus Polda Riau, pada hari ini, Selasa (2/11).

"Pemeriksaan saksi-saksi dilakukan di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau, Jalan Pattimura No.13, Pekanbaru, Provinsi Riau," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat, Selasa (2/11).

Terkait kasus tersebut, KPK telah menetapkan Bupati Kuansing, Andi Putra (AP), dan General Manager (GM) PT Adimulia Agrolestari, Sudarso (SDR), sebagai

tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kuansing.

Andi Putra diduga telah menerima suap sebesar Rp700 juta secara bertahap dari Sudarso terkait pengurusan izin perpanjangan HGU sawit PT Adimulia Agrolestari. Uang sebesar Rp700 juta tersebut merupakan realisasi awal dari komitmen fee yang telah disepakati oleh keduanya.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka usai KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Kuansing, Riau, pada Senin (18/10) lalu.

Dari operasi senyap tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang yang diduga merupakan suap.

Atas perbuatannya, Sudarso selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Andi Putra selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. ● **han**

2 Polhukam

IDN/ANTARA



RAPAT PARIPURNA DPD
Wakil Ketua DPD Nono Sampono (kiri) menyaksikan Wakil Ketua DPD Mahyudin (tengah) menerima laporan kegiatan dari anggota DPD dalam rapat Paripurna DPD Masa Sidang II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/11). Paripurna tersebut beragendakan pembukaan masa sidang II tahun sidang 2021-2022, pidato pembukaan masa sidang II tahun sidang 2021-2022, laporan kegiatan anggota DPD di daerah pemilihan.

KIP Tolak Gugatan Sengketa Informasi Hasil Asesmen TWK Pegawai KPK

KIP sebut bahwa dokumen yang berisi soal-soal tes tertulis hingga dokumen panduan wawancara TWK tidak dalam penguasaan KPK sebagai pihak termohon.

JAKARTA (IM) - Komisi Informasi Pusat (KIP) menolak gugatan sengketa informasi yang diajukan Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) mengenai hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

FOINI merupakan sebuah koalisi organisasi masyarakat sipil dan individu yang fokus pada advokasi keterbukaan informasi. Majelis berpendapat, informasi yang menjadi sengketa seperti dokumen yang berisi soal-soal tes tertulis hingga dokumen panduan wawancara TWK tidak dalam penguasaan KPK sebagai pihak termohon.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar ketua majelis, Gede Narayana dalam sidang, Senin (1/11).

"Menyatakan informasi dalam sengketa a quo tidak dalam penguasaan termohon," ucap dia. Gede mengatakan, alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN, dan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 4 Perkom 1/2021, ujar dia, selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana Ayat 3, untuk memenuhi syarat Ayat 2 huruf b dilaksanakan asesmen TWK oleh KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Oleh sebab itu, lanjut Gede, KPK menyerahkan sepenuhnya kepada BKN untuk mengatur teknis pelaksanaan, sumber daya pelaksana, maupun metode evaluasi asesmen TWK.

"Sesuai dengan fakta yang diperoleh di dalam persidangan tertutup dan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa termohon dalam pelaksanaan asesmen TWK hanya menerima hasil asesmen TWK yang kemudian dipergunakan sebagai proses peralihan pegawai KPK jadi ASN," ucap Gede.

"Sehingga, informasi yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa a quo tidak dalam penguasaan termohon," ucap Gede.

Sebelumnya, FOINI sudah menyampaikan surat permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPK dan BKN. Surat itu berisi permintaan kepada kedua instansi negara itu untuk membuka ke publik dokumen-dokumen yang memuat soal-soal tertulis

TWK pegawai KPK dan panduan wawancara, termasuk daftar pertanyaan wawancara pada proses TWK.

Namun, FOINI tidak mendapat jawaban terkait permohonan informasi yang diminta dibuka tersebut. ● **han**

SBY Telepon Jokowi soal Berobat Kanker Prostat ke Luar Negeri

JAKARTA (IM) - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menelepon Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberitahukan rencananya berobat ke luar negeri (LN). Presiden ke-6 RI itu harus berobat intensif karena didiagnosis mengidap kanker prostat.

"Presiden Jokowi memberikan respons yang baik dan menyampaikan bahwa satu-dua anggota Tim Dokter Kepresidenan akan mendampingi dalam pengobatan tersebut," ujar Staf Pribadi SBY, Ossy Dermawan, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/11).

SBY dalam waktu dekat akan melakukan medical check-up dan treatment di luar negeri. Sesuai dengan diagnosis dari tim dokter, SBY mengidap kanker prostat (prostate cancer).

Berdasarkan hasil pemeriksaan baik melalui metode MRI, biopsi, Positron Emission Tomography (PET) Specific Membrane Antigen (SMA) Scan dan pemeriksaan yang lain, kanker prostat yang diderita oleh SBY masih berada dalam tahapan (stadium) awal.

"Sesuai dengan kondisi kesehatan Bapak SBY saat ini, tim dokter menyimpulkan semua opsi terbuka untuk melakukan pengobatan dan penyembuhan Bapak SBY. Setelah dilakukan konsultasi yang mendalam dengan Tim Dokter Indonesia, termasuk para urolog senior, diputuskan medical treatment dilakukan di sebuah rumah sakit di luar negeri yang memiliki pengalaman

panjang dan teknologi yang maju untuk menangani kanker prostat," kata Ossy Dermawan

"Komunikasi yang dilakukan antara Tim Dokter Indonesia dan Tim Dokter negara sahabat tersebut berlangsung dengan baik dan pihak luar negeri sepakat dan bersedia untuk menanganinya Bapak SBY.

Ketua Tim Dokter luar negeri dalam komunikasi langsung dengan Bapak SBY (via telemedicine), setelah mempelajari semua data kesehatan Bapak SBY, menyampaikan optimismenya untuk bisa mengatasi penyakit yang diderita Bapak SBY," pungkas Ossy Dermawan.

Dirawat di Amerika Serikat

Informasi dari Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan, rencananya SBY akan menjalani perawatan medis kanker prostat di Kota Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat setidaknya selama 1,5 bulan.

"Cukup lama sih ya (SBY dirawat di AS) karena memerlukan check up, kemudian perawatan, check up lagi, kurang lebih 1,5 bulan," ujar Syarif Hasan kepada awak media di Lantai VII Gedung Nusantara III MPR/DPK/DPD Senayan Jakarta, Selasa (2/11).

Ia menyebutkan, rencananya SBY akan berangkat menggunakan pesawat hari ini untuk dirawat di RS Maio tidak jauh dari Minneapolis.

"RS tersebut merupakan RS khusus untuk menangani penyakit kanker," terang Syarif Hasan. ● **han**

DPR Berharap Pemerintah dan KPU Segera Sepakati Jadwal Pemilu

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa berharap, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat segera menyepakati jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

"Kita lagi meminta agar pemerintah dan penyelenggara untuk secepat dululah. Karena ini, kalau selama pemerintah dan penyelenggara itu belum secepat terkait dengan soal jadwal, maka di DPR pasti tidak akan pernah ada kata secepat juga, pasti akan ada beda pilihan," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/11).

Ia menuturkan, Komisi II ingin agar penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak diawali oleh perbedaan pendapat agar tidak menciptakan suasana yang politis. Pasalnya, menurut Saan, Pemilu 2024 merupakan sebuah agenda besar yang menentukan untuk lima tahun ke depan, baik bagi demokrasi, pemerintahan, serta rakyat.

"Masak sih untuk urusan jadwal saja harus kita voting, misalnya suara terbanyak di

Komisi II. Kita enggak mau seperti itu, karena ini agenda besar kita, agenda demokrasi kita, yang akan menentukan lima tahun ke depan," ujar Saan.

Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, Komisi II tidak menetapkan tenggat waktu bagi pemerintah dan KPU untuk menemukan kata sepakat. Namun, ia berharap agar jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat disepakati oleh pemerintah dan KPU sebelum DPR kembali memasuki masa reses pada akhir 2021 mendatang.

Saan mengingatkan, jadwal Pemilu 2024 perlu segera dipastikan agar penyelenggara pemilu dan partai politik dapat memulai persiapan untuk menghadapi Pemilu. Selain itu, publik juga memerlukan kepastian mengenai tanggal dan bulan apa Pemilu dilaksanakan.

Seperti diketahui, hingga kini belum ada kesepakatan antara pemerintah dan KPU mengenai jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024. Di satu sisi, KPU mengusulkan agar hari pemungutan suara Pemilu 2024 jatuh pada 21 Februari 2024, sedangkan pemerintah mengusulkan 15 Mei 2024.

● **mei**

PPKM di Jakarta Masuk Level 1, Prokes Tetap Harus Nomor Satu

JAKARTA (IM) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyambut baik perubahan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta yang kini berada di Level 1.

Puan mengajak semua pihak untuk terus menjaga protokol kesehatan karena DKI Jakarta sebelumnya merupakan salah satu daerah dengan kasus positif terbanyak.

"Kita cukup gembira saat ini Ibu Kota Negara sudah berada di level terendah PPKM. Jakarta kini berada pada PPKM Level 1, prokes pun tetap harus nomor 1," kata Puan dalam siaran pers, Selasa (2/11).

Politikus PDI-P itu mengingatkan pemerintah daerah agar jangan lengah meski kasus Covid-19 di Jakarta sudah melandai. Pemerintah daerah perlu mempercepat pemberian vaksin bagi warga Jakarta demi

mencegah terjadinya lonjakan kasus. Namun demikian, masyarakat juga diminta berpartisipasi aktif menjaga Jakarta agar kasus Covid-19 tidak melonjak lagi seperti beberapa

Kesadaran masyarakat menerapkan pola hidup sehat dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan (Prokes) 3 M, yakni memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jara, merupakan salah satu faktor keberhasilan penanganan pandemi.

"Walaupun sekarang mal, tempat makan dan sejumlah sektor lainnya sudah bisa beroperasi penuh, tetap harus selalu waspada terhadap penyebaran virus," ujar Puan.

Penurunan status PPKM menjadi level 1 di Jakarta diyakini ddpadat memperbaiki pertumbuhan perekonomian yang sempat jeblok selama pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi akan berujung dengan

peningkatan kesejahteraan rakyat.

Puan juga berharap, tujuannya level PPKM di Jakarta akan mengembalikan kegiatan pendidikan ke situasi normal.

Seperti diberitakan, wilayah DKI Jakarta memasuki status level 1 dalam perpanjangan PPKM 2-15 November 2021. Status PPKM Level 1 di Jakarta tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali.

Dengan status tersebut, ada sejumlah pelanggaran yang diterapkan di wilayah DKI Jakarta. Contohnya, pusat perbelanjaan kini dapat menerima 100 persen pengunjung, tidak ada batasan waktu makan di tempat umum, dan sektor non esensial dapat menerapkan aturan bekerja dari kantor hingga 75 persen karyawannya. ● **mar**

IDN/ANT



RDPU KOMISI II DPR DENGAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU-BAWASLU
Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Juri Ardiantoro mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/11). Rapat tersebut membahas laporan dan audiensi Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027.